

Opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun 2009– 2014 adalah:

- a. LKPD Tahun 2009 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2009 senilai Rp3.255.476.545.350,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum melakukan penilaian atas saldo awal aset tetap dan pencatatan aset tetap pada sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- b. LKPD Tahun 2010 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral masih mencatat aset daerah yang telah digunakan oleh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena aset tersebut belum dilakukan penyerahan secara resmi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- c. LKPD Tahun 2011 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan yaitu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum menyajikan investasi non permanen dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan aset tetap belum dilakukan penyusutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- d. LKPD Tahun 2012 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.
- e. LKPD Tahun 2013 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.
- f. LKPD Tahun 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyajikan laporan keuangan secara wajar untuk semua hal yang material.